

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Huraerah, 2012. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ani Purwati, 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Aria Zurnetti dan Efren Nova, 2022. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan)*. Padang: Andalas University Press.
- Edi Abdullah dan Johariani, 2023. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Sleman: Deepublish.
- Diana Dewi Sartika, Et, Al., 2022. *Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak untuk Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan*. Ponorogo: Wade Group.
- Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, 2021. *Hukum Pidana dan HAM Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- I Ketut Mertha, Et. Al., 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Komnas Perempuan, 2024. *Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Et. Al., 2020. *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, 2019. *Hukum Pidana*. Banten: Unpam Press.
- Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Nur Solikin, 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Otong Rosadi, 2021. *Pengaturan Anak di Indonesia: Hak Anak, Perlindungan Anak, dan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Padang: Visigraf.
- Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: CV Budi Utama.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sangir Multi Usaha.

Wardah Nuroniya, 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok Tengah: Yayasan Hamjah Diha.

Yulita Pujilestari, Amelia Haryanti, dan Abi Robian, 2020. *Pengantar Hukum Pidana*. Banten: Unpam Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Lembaran Lepas Nomor 29.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4928.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak.

Peraturan Walikota Padang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Berita Negara Nomor 2 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Berita Negara Nomor 1355 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025. Berita Negara Nomor 277 Tahun 2025.

Konvensi Hak Anak.

C. Jurnal

- Efren Nova dan Edita Elda, 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat)”. *UNES Journal of Swara Justitia*. Volume 10 Nomor 10.
- Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, 2021, “Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak”. *Humanitas*, Volume 3 Nomor 2.
- Trini Handayani, 2016. “Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak”. *Jurnal Mimbar Justitia*, Volume 2 Nomor 2.
- Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih, 2020. “Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan”. *Jurnal Kewarganegaraan*. Volume 4 Nomor 2.

D. Skripsi

- Laura Stephany Masniari Siregar, 2023. *Skripsi: Upaya UPTD PPA Provinsi Lampung dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Pelecehan Seksual*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Yully Novita Sari, 2019. *Skripsi: Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Padang*. Padang: Universitas Andalas.

E. Website

- Diskominfo, “Pemko Banda Aceh Godok UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak”, <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2021/09/14/pemko-banda-aceh-godok-uptd-perlindungan-perempuan-dan-anak/>. Diakses pada 28 Oktober, pukul 21.31.
- Elan Silvia Sari, “P2TP2A Kota Padang Terima 56 Laporan Kekerasan”, <https://rri.co.id/index.php/daerah/916530/p2tp2a-kota-padang-terima-56-laporan-kekerasan>. Diakses pada Tanggal 01 Oktober 2024, pukul 04.56.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/anak>. Diakses pada tanggal 14 April 2024, pukul 22.02.
- Kemenpppa, “Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan”, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan&ved=2ahUKEwj7mpPFsq6FAUBzDgGHR4vDiMQFnoECBkQAQ&usq=A0vVaw3zxyjHR5PTLQxss7BU-q->. Diakses pada tanggal 6 April 2024, pukul 22.41.

Kemen PPPA, *Prosedur Pembentukan UPTD PPA*.
<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/konten/MTI4>. Diakses pada
Tanggal 31 Mei 2025 Jam 01.12.

TB News, “Sebagai Layanan Terpadu, Ratusan Unit Perlindungan Perempuan Anak Dibentuk”, <https://tribrataneews.polri.go.id/blog/pppa-9/sebagai-layanan-terpadu-ratusan-unit-perlindungan-perempuan-anak-terbentuk-75651>,
Diakses pada 28 Oktober 2024, pukul 22.10.

F. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

G. Dokumen

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
2024. *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja*.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat
tahun 2023.

